

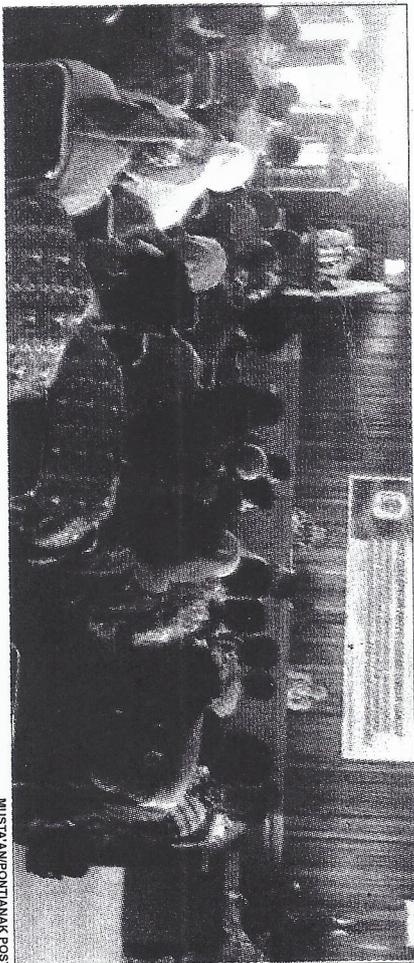


Tuntaskan Semua Temuan BPK

PUTUSSIBAU—Bupati Kabupaten Kapuas Hulu, A.M Nasir SH menagih komitmen masing-masing SKPD (satuan kerja perangkat daerah) dalam menyelesaikan temuan-temuan BPK-RI. Itu disampaikan saat membuka rapat percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI Kalbar dan APIP di lingkungan Pemkab Kapuas Hulu, di Aula Setda, Kamis (18/6).

Nasir mengatakan, kegiatan rapat tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI seringkali dilaksanakan. Ini mesti sesuai dengan komitmen bersama seluruh SKPD untuk segera menuntaskan temuan-temuan yang ada.

"Sebelumnya Sekda saja cukup untuk membuka kegiatan ini. Tapi, saya sengaja hadir untuk memberi motivasi kepada semua jajaran untuk segera menyelesaikan temuan," tegas Nasir.



MUSTAFA/PONTIANAK POST

ARAHAN: SKPD saat mendingarkan paparan dari Bupati Kapuas Hulu A.M Nasir.

Pada acara yang dihadiri Sekda, Ir H Muhammad Sukri, jajaran kepala SKPD dan Camat se Kapuas Hulu itu Nasir menegaskan, jajaran Pemkab Kapuas Hulu mesti kooperatif dalam menyelesaikan temuan-temuan yang ada pada masing-masing instansi. Meskipun

temuan tersebut dominan dari periode kepemimpinan terdahulu. "Kalau saya lihat dari temuannya tidak terlalu berat," ungkapnya.

Menurut Nasir, temuan sekurang ini tidak terlalu berat, sebab temuan dari 2010-2015 tidak banyak. Untuk temuan

tahun 2004 hingga 2008 itu yang perlu segera diselesaikan, agar tidak numpuk. Temuan dari tahun 2004 hingga 2008 bervariasi. Beberapa diantaranya memang berkaitan dengan temuan servis mobil hingga kegiatan pembangunan pagar untuk sejumlah instansi vertikal

daerah ini.

Demikian juga dengan pinjaman pihak ke tiga. "Ini memang kelemahan terdahulu yang mesti diperbaiki. Jujur saja, kalau ada temuan terbaru siapa yang bertanggungjawab harus menuntaskan, walau sudah pindah instansi. Karena ini harus diselesaikan agar tidak berlarut," imbuhnya.

Terkait temuan aset memang sudah ada sistem yang bagus yang telah disiapkan oleh Pemkab Kapuas Hulu. "Sistem itu perlu dukungan pelaporan data aset dari kecamatan dan SKPD. Pelaporan tersebut memang rumit, namun bisa segera selesai," kata Nasir.

Surat teguran dan peringatan untuk penyelesaian temuan sudah cukup banyak yang di layangkan kepada SKPD terkait. Mulai dari surat yang ditanda tangani Inspektoral hingga surat yang ditandatangani Wakil Bupati dan Bupati. (am)